

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News, 2021, “ICW: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor Anggaran Dana Desa”, <https://www.antaranews.com/berita/2827093/icw-kasus-korupsi-2021-terbanyak-di-sektor-anggaran-dana-desa>.
- Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, 12, no. 2 (2016).
- Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, (2018).
- Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- _____, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada (2010),
- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, ”Hukum Pidana”, Pustaka Pena Pers: Makassar (2016).
- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghana Indonesia (1985).
- Andi Munafri, “Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang lain, atau Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Media Hukum 9, Nomor 2 (2021).
- Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochacti, dan Ani Purwanti, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan

- Hukum” (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID SUS.ANAK/2015/PN SMG), *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika : Jakarta, Hukum Acara Pidana Indonesia (2008).
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- DR. M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*, Jurnal article; Jakarta, (2006).
- DataIndonesia.id, “Kerugian Negara akibat Korupsi capai Rp62,93 Triliun pada 2021 <https://dataindonesia.id/varia/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021> (2022).
- Dwi Febri Arifiyanto, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.2.
- DPMG Aceh, “14 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023”, <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/14-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2023> (2022).
- Ega Fatmawati, “Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual Dengan Foto Repro” (Universitas Diponegoro 2013).
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, 12, no. 2 (2016).

- Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Litigasi, Vol. 17, Nomor 2, Fakultas Hukum Andalas, 2016.
- Herdjito, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, 2014.
- Indonesia Corruption Watch, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”, 2022.
- _____, Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik, Jakarta, 2018.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Prenadamedia Group: Jakarta, 2014.
- Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi, Setara Press, Malang (2016).
- Kristian dan Yopi Gunawan. Tindak Pidana Korupsi. PT Refika Aditama. Bandung, 2015.
- Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm 94.
- Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS, Vol. VI, No. 3, Desember 2018. hlm 431.

Kusumah M.W, Tegaknya Supremasi Hukum, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

Lilik Mulyadi, Politik Hukum Kebijakan Legislasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Kesalahan dan Harta Pelaku tindak Pidana (Makalah), 2016.

Miriam Budiarto, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).

M. Edo Rezawan, “Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi”, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993).

M. Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2021).

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung. Citra Aditya. 2006.

NTT Pembaruan, “Modus Penyelewengan Dana Desa Menjadi Potensi Korupsi”, <https://nttpembaruan.id/modus-penyelewengan-dana-desa-menjadi-potensi-korupsi/>, 2021.

Pitan Dasland, Menyibak Kebenaran: Eksaminast Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Bumi Aksara Jakarta, 2018.

PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981.

Riki Wisandi, “Tinjauan Terhadap Fungsi Pengawasan Inspektorat Jenderal KEMENDIKBUD Jakarta Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Di

- Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Suatu Kajian Yuridis PERMENDIKBUD No 11. Tahun 2015)", (Universitas Diponegoro, 2017).
- Ridlwani Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, 2011.
- Sadikno Mertokusumb. *Hidam Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty. 1988).
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018).
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975)
- Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen* Vol.II/No. 2, 2013.
- Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid/2015/PT.DS)*, *Jurnal Vestek*, no. 2 (2017).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni 1986).
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2005)
- Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, Yogyakarta: cahaya atma pustaka, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Tinuk Dwi Cahyani, "Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam", (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru), 2021.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zakariya, R. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. Jurnal Antikorupsi. Vol. 6, No. 2.